

REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI PAJAK DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK

ARROFA ALIFIA SALMA

Universitas Djuanda, salmaarrofa@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan memodernisasi sistem perpajakan. Pertanyaannya, apakah modernisasi ini benar-benar dapat membuat wajib pajak akan lebih meningkat. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan bagaimana memodernisasi administrasi perpajakan memiliki dampak. Perspektif dari penelitian ini untuk mengevaluasi masalah kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang wajib pajak. Meskipun tidak terlihat dampak teknologi informasi dan fasilitas pelayanan moral atas kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun sistem administrasi perpajakan memengaruhi ketaatan wajib pajak, belum dapat dipastikan bahwa teknologi informasi atau layanan yang terkait dengan kode etik dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak.

Kata kunci: Ketaatan pajak, standar etika, kuantitas pelayanan, teknologi informasi dalam fasilitas pelayanan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu cara pemerintah mengumpulkan uang untuk pertumbuhan dan pengeluaran. Agar pajak dapat ditentukan dan dipungut, diperlukan administrasi perpajakan. Menurut Rahayu dan Lingga (2009) dan Nasucha (2004), dalam mengevaluasi keberhasilan penerimaan pajak, penting untuk mempertimbangkan pencapaian tujuan administrasi perpajakan, melalui: Meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara konsisten menerapkan undang-undang perpajakan untuk pendapatan setinggi mungkin. dengan biaya serendah mungkin. Untuk mencapai tujuan berikut sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan reformasi administrasi: (1) kepatuhan sukarela yang tinggi; (2) aspek kepercayaan yang tinggi terhadap administrasi perpajakan; dan (3) tingkat produktivitas aparat pajak yang tinggi.

Pemerintah bersiap dalam membenahi pola administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun itu kepatuhan wajib pajak. Pertama, penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan

mendorong ketaatan wajib pajak melalui modifikasi pola administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak. harus mencakup rincian atau data tentang hal-hal yang mendorong kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwasanya memodernisasikan administrasi perpajakan memiliki efek yang tidak konsisten akan ketaatan wajib pajak. Ini juga menyoroti ketidakpastian seputar bagaimana modernisasi dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan mempunyai berbagai implikasi terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian sebelumnya. Peneliti ingin menyelidiki dampak modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehubungan dengan kejadian ini.

METODE PENELITIAN

Data dasar yang dikenakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. KPP Pratama Madiun Kota merupakan populasi penelitian. Struktur organisasi, kualitas pelayanan, teknologi informasi dalam fasilitas layanan, dan pedoman etika merupakan faktor independen dalam penelitian ini. Ketaatan wajib pajak merupakan variabel dependen penelitian ini. Menggunakan pertanyaan yang dikembangkan Rahayu dan Lingga (2009), variabel penelitian ini diukur. Variabel ini memakai skala Likert lima poin, dengan 1 berarti "STS", 2 berarti "TS", 3 berarti "netral", 4 berarti "sepakat", dan 5 berarti "SS". Beberapa tahapan pengujian dilakukan terhadap data dalam penelitian ini, antara lain pemeriksaan validitas dan reliabilitas, uji penerimaan tradisional (yang mencari hal-hal seperti normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), dan uji regresi berganda memakai SPSS 17.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan Data

Di KPP Pratama Madiun, sebanyak 50 kuesioner dibagikan. Survei tersebut masing-masing memiliki 44 dan 88% responden. Dua kuesioner pertama diabaikan setelah dilihat dan dinilai karena responden tidak berasal dari kelompok yang memenuhi persyaratan, khususnya. Sekretaris Oleh karena itu, 42 data perlu diolah. Dari 42 data yang diolah selanjutnya dapat digunakan untuk melihat informasi demografis yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 : Demografi

No	Keterangan	Total	Persentase
1.	Gender		
	Pria	22	52%

	Wanita	20	48%
2.	Lama Kerja		
	1 s/d 5 tahun	39	93%
	➤ 5 tahun	3	7%
3.	Jenjang Pendidikan		
	SMA	12	29%
	Diploma	8	19%
	S1	22	52%
4.	Mewaspadai setiap perubahan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan		
	Ya	40	95%
	Tidak	2	5%

Statistic deskriptif pada Tabel 2 memberikan gambaran bagaimana tanggapan responden terhadap setiap variabel. Nilai rata-rata setiap variabel dalam kolom menampilkan nilai yang lebih besar dari tiga. Responden biasanya setuju dengan komentar yang dibuat tentang setiap variabel. Kualitas layanan adalah persepsi utama.

Table 2 : Statistic Deskriptif

Variable Penelitian	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Jumlah pertanyaan	Rata - rata tiap item
Struktur organisasi	42	12	19	15.71	22.003	4	3.927
Tingkat Layanan	42	14	20	16.76	1.543	4	4.190
Fasilitas layanan yang menggunakan teknologi	42	12	18	15.38	1.724	4	3.845
Kode etik	42	9	20	15.14	2.248	4	3.785
Kepatuhan wajib pajak	42	16	32	26.03	3.475	7	3.718

Uji validitas dan reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas didapat nilai signifikan antara 0,000 sampai dengan 0,005 yang menunjukkan bahwa setiap indikator valid untuk semua variabel. Kurang dari 0,05 merupakan nilai yang signifikan menunjukkan hal ini. Kriteria tidak berlaku untuk Opini (Kepatuhan Wajib Pajak) No. 21, 24, atau 26 karena bersifat cross-loading. Nilai

Cronbach's alpha tiap-tiap variabel berkisar antara 0,624 sampai dengan 0,795, sesuai dengan hasil uji reliabilitas. Setiap variabel yang dimasukkan dalam penelitian ini mempunyai nilai lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan dependabilitas data.

Tes hipotesis klasik

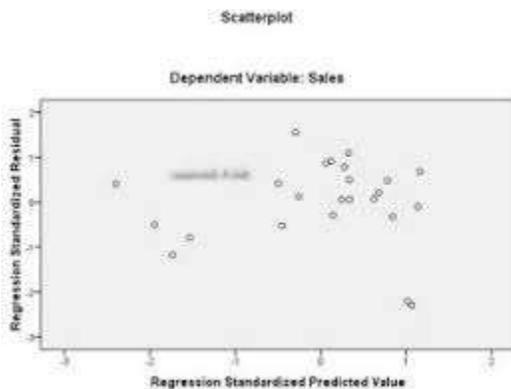
Uji Multikolinearitas

Nilai variance inflation factor (VIF) 1.110-1.330 dan nilai tolerance 0.752-0.960; 10 dalam uji multikolinearitas, dan karena itu, model regresi tidak multikolinear. Hal ini diakibatkan nilai tolerance > 0.10 dan nilai variance inflation factor (VIF) sebesar < 10 .

Uji heteroskedastisitas

Gambar 2 mengilustrasikan bagaimana titik-titik pada sumbu Y tersebar ini berfluktuasi tidak menentu di atas dan di bawah nol. Hal ini memperlihatkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Gambar 2:



Penelitian tentang uji heteroskedastisitas

uji autokorelasi

Skor Durbin-Watson untuk penelitian ini adalah 1,882. Nilai Durbin-Watson ini, yaitu sebesar 1,7202, 1,882, dan 2,2798, menunjukkan tidak adanya autokorelasi pada data penelitian ini.

Uji Standar Garis diagonal diikuti oleh titik-titik yang menyebar. Ketika persamaan regresi residual yang tidak standar menjalani uji Kolmogrov-Smirnov dan hasilnya adalah persamaan tersebut konsisten dengan asumsi normalitas pada sig (2-tailed) 0,531 (sig. $> 0,05$).

Uji Hipotesis

Table 3 menampilkan nilai koefisien temuan uji regresi. Hipotesis 1 mengatakan bahwa struktur organisasi berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak. Hasil table 3 dari uji investigasi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,587 dan sig 0,05 sama dengan 0,028 . Sejak sig 0,05

Table 3 : Koefisiensi Regresi

Variable independent	Hip	Variable dependen : Pred.	Kepatuhan Koefisien	Wajib Nilai t	Pajak Sig.	(r ² =0.362) Kesimpulan
Konstan			1.649			
Struktur organisasi	H1	+	0.587	2.282	0.028**	Valid
Kualitas layanan	H2	+	0.752	2.315	0.026**	Valid
Fasilitas layanan dengan TI	H3	+	0.200	0.730	0.470	Tidak Valid
Kode etik	H4	+	-0.033	-0.033	0.871	Tidak Valid

Hipotesis ketiga menjelaskan bagaimana fasilitas pelayanan yang dilengkapi penggunaan teknologi informasi berdampak pada ketaatan wajib pajak. Hasil pengujian pada Table 3 menunjukkan bahwa nilai koefisien adalah 0,200 dan sig > 0,05 atau H.0.470. H3 tidak terdukung karena analisis hipotesis dianggap tidak signifikan karena sig > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwasanya penggunaan teknologi informasi pada sarana pelayanan tidak meningkatkan ketaatan wajib pajak. Dengan langsung ke kantor pajak daripada mengajukan dan melaporkan pajak mereka secara online, masyarakat dapat melakukannya dengan lebih aman dan tanpa mempengaruhi penggunaan layanan teknologi informasi. Melalui kajian ini, diharapkan masyarakat akan lebih mengenal industri layanan online, yang akan mendorong pembelian online dan berdampak pada ketaatan wajib pajak.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian:

Nilai signifikansi 0,0280>0,05 diberikan pada variabel struktur organisasi dalam penelitian ini. Maka ditetapkan bahwa fasilitas layanan TI di Kota Madiun tidak

berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Ditetapkan bahwa kode etik di KPP Pratama Kota Madiun tidak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak karena nilai signifikansinya dalam penelitian ini adalah $0,871 > 0,05$. Temuan penelitian ini jelas memiliki keterbatasan yang harus diperhitungkan. Sampel sangat minim karena hanya ada satu KPP Pratama yang diperiksa dalam penelitian ini. Perspektif wajib pajak masih digunakan untuk menilai variabel kepatuhan wajib pajak. Skor R-squared penelitian ini masih cukup rendah.

Saran studi tambahan untuk penyelidikan tambahan. Dengan memasukkan studi KPP Pratama, lebih banyak studi dapat mengevaluasi variabel penelitian ini dengan lebih efektif. Untuk melihat bagaimana wajib pajak merasa memenuhi kewajiban perpajakannya, gabungkan pengukuran variabel dengan pembayar pajak. Untuk meminimalkan R-squared, studi selanjutnya dapat menambahkan lebih banyak variabel independen.

REFERENSI

- Kajian Nasabah Bank BCA: Pengaruh Persepsi, Kenyamanan, Risiko, dan Atribut Layanan Teknologi Informasi Terhadap Minat Berulang Nasabah Bank Menggunakan Internet Banking. G.R. Amijaya, 2010. Skripsi dari Universitas Diponegoro Semarang.
- Enda, kembali. 2010. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Gambir Empati, diterapkan sistem administrasi perpajakan kontemporer, dan diteliti dampaknya terhadap kewajiban wajib pajak dan pemungutan pajak penghasilan. Disertasi PhD, Universitas Indonesia, Depok.